

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, setiap orang tentu akan mengakui bahwa seseorang yang banyak mengadakan perjalanan mempunyai informasi serta pengetahuan mendalam tentang peristiwa maupun situasi dalam berbagai bidang dan aspek kehidupan yang sangat luas, baik dalam ukuran nasional maupun skala internasional. Ini adalah salah satu aspek akibat yang ditimbulkan oleh dunia pariwisata. Oleh karena itu, dengan mempergunakan rumusan pemikiran ini sebagai dasar, maka banyak pemerintah diberbagai negara memandang perlu untuk membangun industri pariwisata sebagai suatu industri penting.¹

Berbagai organisasi internasional antara lain PBB, Bank Dunia dan World Tourism Organization (WTO), telah mengakui bahwa pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan social dan ekonomi. Diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif kaya pada awal abad ke-20, kini telah menjadi bagian dari hak azazi manusia, sebagaimana dinyatakan oleh John Naisbitt dalam bukunya *Global Paradox* yakni bahwa “*we here once travel was considered a privilege of the moneyed elite, now it is considered a basic human*

¹ Nyoman S. Pendit, *Ilmu Pariwisata sebuah pengantar perdana*. Jakarta, Pradnya Paramita, 1999, hal.69

right. Hal ini terjadi tidak hanya di negara maju tetapi mulai dirasakan pula di negara berkembang termasuk pula Indonesia.²

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki berbagai keunikan atau daya tarik pariwisata dari setiap daerahnya. Pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor ekonomi penting yang dapat menambah devisa negara. Pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Berdasarkan data tahun 2010, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 7 juta lebih atau tumbuh sebesar 10,74% dibandingkan tahun sebelumnya dan menyumbangkan devisa bagi negara sebesar 7.603,45 juta dolar Amerika Serikat.³

Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. Alam Indonesia memiliki kombinasi iklim tropis, 17.508 pulau yang 6.000 di antaranya tidak dihuni, serta garis pantai terpanjang ketiga di dunia setelah Kanada dan Uni Eropa. Negara Indonesia memiliki beranekaragam wisata yang terbentang dari sabang sampai marauke, mulai dari *wisata* alam, wisata budaya maupun wisata kulinernya. Banyak orang menyebutkan Indonesia adalah surga dunia yang memiliki banyak keanekaragaman wisata yang begitu indah dan memiliki khas di mana tiap daerahnya memiliki kebudayaan yang berbeda beda yang melambangkan ciri khas dari daerah tersebut. Oleh karena itu, banyak wisatawan, baik domestik maupun

²http://kolom.pacific.net.id/ind/setyanto_p.santosa/artikel_setyanto_p_santosa/pengembangan_pariwisata_indonesia.html diakses pada tanggal 11 November 2012

³<http://indonesian.cri.cn/201/2013/02/28/1s135979.htm> diakses pada tanggal 11 November 2012

mancanegara yang mengagumi keanekaragaman budaya dan wisata di Negara Indonesia.⁴

Beberapa daerah tujuan wisata di Indonesia antara lain pantai-pantai di Bali, tempat menyelam di Bunaken, Gunung Rinjani di Lombok, dan berbagai taman nasional di Sumatera merupakan contoh tujuan wisata alam di Indonesia. Tempat-tempat wisata itu didukung dengan warisan budaya yang kaya yang mencerminkan sejarah dan keberagaman etnis Indonesia yang dinamis dengan 719 bahasa daerah yang dituturkan di seluruh kepulauan tersebut.⁵ Candi Prambanan dan Borobudur, Toraja, Yogyakarta, Minangkabau, dan Bali merupakan contoh tujuan wisata budaya di Indonesia. Namun bukan hanya itu tempat tujuan wisata budaya di Indonesia. Solo, salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah juga merupakan salah satu kota budaya sekaligus daerah tujuan wisata.

Solo memiliki warisan budaya lokal yang meliputi kemegahan budaya dan sejarah kerajaan yang membuat wisatawan baik domestik maupun mancanegara tertarik untuk mengunjungi kota ini. Karaton Surakarta dan Puri Mangkunegaran dijadikan perwakilan budaya Jawa untuk terus dilestarikan demi kelangsungan warisan dari masa lalu dan sejarah.⁶

Kota yang memiliki nama lain Kota Surakarta ini, merupakan kota kedua terbesar di propinsi Jawa Tengah. Secara geografis dan administratif Solo berlokasi di tengah eks-Karisidenan Surakarta yang wilayahnya meliputi Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten (Solo Raya). Kota ini

⁴ <http://ukiparner.blogspot.com/2012/11/makalah-pariwisata.html> diakses pada tanggal 24 Desember 2012

⁵ <http://www.pariwisataindonesia.net/> diakses pada tanggal 11 November 2012

⁶ <http://soloraya.co.id/soloraya/surakarta.html> diakses pada tanggal 11 November 2012

menempati posisi penting dalam peta politik nasional karena dalam hal potensi investasi, dikenal sebagai kota yang fokus terhadap sektor manufaktur namun juga diikuti dengan perdagangan, restoran & hotel. Selain itu, juga dikenal dalam sektor keuangan, pusat perdagangan dan jasa di wilayah Solo serta penyedia tulang punggung manufaktur yang penting. Kota ini menjadi anak emas. Dibuktikan dengan banyaknya dana dari pusat untuk pembangunan ekonomi kota Solo, yang menjadikannya sebagai daerah potensial untuk memperluas usaha, membuka peluang bagi investor untuk menanamkan investasinya dan mengembangkan industri sandang, perbankan, dan pariwisata.⁷

Seiring dengan adanya semangat otonomi daerah, setiap daerah dimungkinkan untuk mengeksplor potensi-potensi yang dimilikinya. Hal inilah yang pada akhirnya melahirkan pemikiran Pemerintah daerah se-eks-karesidenan Surakarta untuk membuat branding tersendiri bagi kota budaya yang memiliki potensi cukup besar di segala bidang yang akhirnya lahirlah slogan “**Solo, *The Spirit of Java***”, dimana slogan itu mencerminkan karakteristik dan potensi wilayah tersebut.⁸ Dengan slogan baru ini, pemerintah kota Surakarta menawarkan keunikan wilayah yang meliputi kekayaan peninggalan warisan budaya, kekhasan karakter masyarakat, terutama kehangatan dan keramahan, serta kekuatan tradisi perdagangan dan industri yang tangguh.

Pemerintah kota Surakarta menyadari bahwa adanya sebuah *brand* tersebut dapat dijadikan sebagai identitas bagi kotanya. Dengan identitas itu, diharapkan akan terbangun image bahwa Kota Solo sebagai pusat kebudayaan

⁷ <http://soloraya.co.id/soloraya/surakarta.html> diakses pada tanggal 11 November 2012

⁸ <http://eksotismesolo.blogspot.com/> diakses pada tanggal 11 November 2012

Jawa, dan juga sebagai langkah untuk menarik wisatawan sekaligus investor baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa obyek wisata budaya yang terkenal di Solo yang mampu menarik wisatawan antara lain Pura Mangkunegaran, Museum Batik Kuno Danar Hadi, Museum Manusia Purba Sangiran, Kraton Surakarta Hadiningrat, Museum Radya Pustaka, Kampung Batik Laweyan. Selain wisata budaya, Solo juga terkenal dengan wisata kulinernya antara lain nasi liwet, gudeg ceker, sate kere, srabi solo, dan lain-lain.⁹ Adanya obyek wisata tersebut juga didukung dengan adanya pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Solo misalnya, mempersiapkan sarana hotel berbintang V, IV, III, II dan I, mempermudah sarana komunikasi dan memperlancar transportasi darat maupun udara.¹⁰ Potensi Kota Surakarta tersebut menunjukkan bahwa kota ini dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan tujuan wisata, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Potensi yang dimiliki oleh kota ini juga didukung dengan adanya upaya dari Pemerintah Kota Surakarta sendiri untuk mempromosikan kota ini sebagai pusat kebudayaan Jawa. Beberapa upaya tersebut merupakan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan berbagai macam acara kebudayaan dan pariwisata dan menjadikannya sebagai program kerja tahunan bagi pemerintah Kota Solo, seperti SIPA (Solo International Performing of Arts), Solo Batik Karnival, Solo Jazz Carnival, SIEM (Solo International Ethnic Musics), dan lain-lain.¹¹ Adanya event-event tersebut, menunjukkan bahwa perhatian terhadap pariwisata sudah sangat

⁹ <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/commodityarea.php?ia=3372&ic=2512> diakses pada tanggal 24 Desember 2012

¹⁰ <http://dishub-surakarta.com/article/34813/potensi.html> diakses pada tanggal 24 Desember 2012

¹¹ www.surakarta.go.id diakses pada tanggal 18 September 2012

meluas tersebar karena sadar akan manfaat yang didatangkan bagi negara-negara atau daerah penerima wisatawan, seperti halnya Kota Surakarta. Adapun salah satu manfaat tersebut yaitu bahwa pariwisata adalah sarana yang ampuh dan efektif bagi kebijakan umum untuk menciptakan perpaduan sosial dan budaya pada tingkat nasional maupun Internasional, untuk mengembangkan industri-industri lain dan sarana pemupukan tenggang rasa dan saling pengertian dengan negara-negara tetangga dan dunia pada umumnya.¹²

Oleh karena itu, agar manfaat tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat, maka pembangunan sektor pariwisata amatlah penting karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta dapat mendorong pemerintah daerah untuk membangun dan memelihara infrastruktur sehingga kualitas hidup masyarakat setempat juga meningkat. Terlebih saat ini telah terjadi pergeseran negara tujuan wisata internasional, dari negara maju ke negara-negara di Asia.¹³ Hal ini menjadi peluang besar bagi pengembangan pariwisata Indonesia, khususnya Pemerintah Kota Solo untuk mendapatkan perhatian dari dunia Internasional.

Dalam dunia diplomasi, pariwisata merupakan perwujudan kepentingan ekonomi suatu negara. Ada beberapa jenis pariwisata yang dapat dijadikan sarana perwujudan kepentingan tersebut, misalnya wisata budaya, wisata kesehatan, wisata politik, wisata olahraga dan lain-lain.¹⁴ Bentuk diplomasi melalui pariwisata ini biasanya disebut diplomasi kebudayaan. Diplomasi kebudayaan ini

¹² Frans Gromang, *Manajemen Kepariwisataaan*. Jakarta, Pradnya Paramita, 1992, hal. 71-72

¹³ <http://www.bappenas.go.id/node/116/3412/potensi-pariwisata-indonesia-harus-dikembangkan/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2012

¹⁴ <http://catatanhat.blogspot.com/2012/05/bentuk-pariwisata.html> diakses pada tanggal 1 Maret 2013

dianggap efektif untuk mencapai tujuan karena pelaksanaannya dilakukan dengan jalan damai tanpa paksaan. Banyak usaha yang dilakukan negara untuk mendapatkan legitimasi melalui diplomasi kebudayaan ini, misalnya melalui kesenian, pertukaran ahli maupun pelajar, olahraga dan lain-lain.

Dalam keterkaitan dengan diplomasi kebudayaan, penulis mencoba untuk mengkaitkan suatu event yang diadakan di Indonesia sebagai sarana diplomasi dalam pencapaian kepentingan Indonesia. Salah satu potensi yang akan dikembangkan adalah potensi pariwisata yang digabungkan dengan olahraga atau dikenal dengan sport-tourism (wisata olahraga). Sport tourism sendiri dimaksudkan dengan wisatawan-wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga maupun menghadiri pesta olahraga disuatu tempat atau negara.¹⁵ Jenis sport-tourism dapat dibagi dalam dua kategori:

- a. Big Sports Events, yaitu peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti Olympiade Games, kejuaraan ski dunia, kejuaraan tinju dunia, Asian Games, Olimpiade dan lain-lain yang menarik perhatian tidak hanya pada olahragawannya sendiri, tetapi ribuan penonton atau penggemarnya.
- b. Sporting Tourism of the Practitioners, yaitu pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekkan sendiri, seperti pendakian gunung, olahraga naik kuda, berburu, memancing, dan lain-lain.¹⁶

¹⁵Nyoman S. Pendit, *Ilmu Pariwisata sebuah pengantar perdana*. Jakarta, Pradnya Paramita, 1999, hal.43

¹⁶ DR. James J. Spillane. *Ekonomi Pariwisata, sejarah dan prospeknya*. Yogyakarta. Kanisius. 1987, hal.30

Pada tahun 2011, Indonesia mendapat kepercayaan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sea Games yang berarti juga siap untuk menjadi tuan rumah Asean Paragames, dimana Kota Solo ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Asean Paragames tersebut. Asean Paragames 2011 merupakan ajang olahraga dua tahunan yang diadakan setelah pesta olahraga Asia Tenggara (SEA Games) untuk atlet-atlet yang mengalami cacat fisik (difabel).¹⁷ Event ini diselenggarakan dan diikuti oleh negara anggota ASEAN. Event olahraga untuk orang cacat ini selalu diselenggarakan setelah event olahraga bagi orang normal berlangsung.

Asean Paragames dilaksanakan setelah Sea Games usai. Dibandingkan dengan Sea Games yang telah dilaksanakan 26 kali, Asean Paragames baru dilaksanakan sebanyak 6 kali.¹⁸ Dimana pertama kali diselenggarakan pada tahun 2001 di Kuala Lumpur, Malaysia.¹⁹ Sebelas negara yang ikut ambil bagian dalam event ini, yaitu Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Timor Leste, Vietnam, dan Indonesia. Cabang Olahraga yang dipertandingkan sebanyak 11 cabang, yakni angkat berat, atletik, bulutangkis, catur, goal ball, panahan, renang, tenis kursi roda, tenis meja, ten pin bowling, dan voli duduk.

¹⁷[http://id.wikipedia.org/wiki/Pesta Olahraga Difabel Asia Tenggara 2011](http://id.wikipedia.org/wiki/Pesta_Olahraga_Difabel_Asia_Tenggara_2011) diakses pada tanggal Oktober 2012

¹⁸http://www.jatengprov.go.id/?document_srl=24029 diakses pada tanggal 6 Oktober 2012

¹⁹<http://nikenfebrina.wordpress.com/2012/03/13/6th-asean-paragames-dan-solo-city-branding/> diakses pada tanggal 6 Oktober 2012

B. Pokok Permasalahan

Dari uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah “ Mengapa Pemerintah Indonesia menetapkan Solo sebagai tempat diselenggarakannya ASEAN Paragames 2011 jika dilihat dalam perspektif Diplomasi Kebudayaan ? “

C. Kerangka Teori

Untuk menjawab rumusan masalah diatas, penulis akan menjelaskan dengan menggunakan konsep Diplomasi Kebudayaan dan Teori Kebijakan (Public Policy). Kerangka ini diharapkan dapat menjelaskan dan menggambarkan tentang Kepentingan Indonesia dalam ajang olahraga Internasional Asean Paragames 2011.

1. Konsep Diplomasi Kebudayaan

Untuk mendefinisikan diplomasi kebudayaan, terlebih dulu perlu dipahami apa definisi dari diplomasi dan juga kebudayaan. Diplomasi secara konvensional menurut pengertian Diplomasi oleh K.J Holsti dalam bukunya Politik Internasional: “kerangka berpikir untuk analisis, adalah usaha suatu negara bangsa untuk memperjuangkan kepentingan nasional dikalangan masyarakat internasional.²⁰ Selanjutnya menurut S.L Roy, diplomasi merupakan seni berunding khususnya bagi negara-negara mengenai keahlian politik.”²¹

²⁰ K.J Holsti, *International Politics : A Framework for Analysis, Third Edition*, New Delhi : Prentice Hall of India, 1984, hal. 82-83

²¹ Tulus Warsito, Wahyuni Kartikasari, *Diplomasi Kebudayaan : Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang : Studi Kasus Indonesia*, Ombak, 2007, hal.3

Sedangkan kata Kebudayaan berasal dari kata budi dan daya yang berarti cinta, karsa dan rasa. Kata ini berasal dari bahasa sansekerta Budhayah yaitu merupakan jamak dari kata Buddhi yang berarti budi atau akal. Menurut Koentjoroningrat, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem, gagasan, milik diri manusia dengan belajar.²² Maka dengan demikian yang dimaksudkan dengan Diplomasi Kebudayaan adalah usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, olahraga, kesenian dan ilmu pengetahuan ataupun secara makro misalnya propaganda, dan lain-lain.²³

Kegiatan diplomasi kebudayaan ini, tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga oleh lembaga-lembaga non pemerintah atau organisasi-organisasi non pemerintah seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Selain itu diplomasi kebudayaan juga dapat dilakukan oleh kelompok, masyarakat, individu-individu termasuk warga negara. Pada dasarnya, diplomasi kebudayaan dapat dilakukan oleh siapapun. Diplomasi kebudayaan dalam hal ini tidak lepas dari pemanfaatan aspek-aspek kebudayaan demi pencapaian tujuan atau kepentingan yang sangat beragam.

Bentuk dan tujuan dari diplomasi kebudayaan itu sendiri juga dipengaruhi oleh situasi dan hubungan dari negara yang terkait didalamnya. Sehingga ada semacam korelasi atau hubungan antara situasi, bentuk, tujuan dan sarana Diplomasi Kebudayaan, yang dapat dilihat pada tabel berikut:²⁴

²² Elly M. Satiadi, et al 2008. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana, Hal.27-28

²³ Tulus Warsito, Wahyuni Kartikasari, *Diplomasi Kebudayaan : Konsep dan Relevansi Bagi Negara Berkembang : Studi Kasus Indonesia*, Ombak, 2007, hal.4

²⁴ *Ibid*, hal. 31.

Tabel 1.1
Hubungan antara situasi, bentuk, tujuan dan sarana
Diplomasi Kebudayaan

Situasi	Bentuk	Tujuan	Sarana
Damai	-Eksibisi - Kompetisi - Pertukaran Misi - Negosiasi - Konferensi	- Pengakuan - Hegemoni - Persahabatan - Penyesuaian	- Pariwisata - Olahraga - Pendidikan - Perdagangan - Kesenian
Krisis	- Propaganda - Pertukaran Misi - Negosiasi	- Persuasi (bujuksn) - Penyesuaian - Pengakuan - Ancaman	- Politik - Mass media - Diplomatik - Misi tingkat tinggi - Opini publik
Konflik	- Teror - Penetrasi - Pertukaran Misi - Negosiasi	- Ancaman - Subversi - Persuasi - Pengakuan	- Opini publik - Perdagangan - Para Militer - Forum Resmi Pihak Ketiga
Perang	- Kompetisi - Teror - Penetrasi - Propaganda - Embargo - Boikot - Blokade	- Dominasi - Hegemoni - Ancaman - Subversi - Pengakuan - Penaklukan	- Militer - Para militer - Penyelundupan - Opini Publik - Perdagangan - Supply barang konsumtif (termasuk senjata)

Sumber: Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari²⁵

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa eksibisi merupakan salah satu bentuk diplomasi kebudayaan. Eksibisi atau pameran dapat dilakukan untuk menampilkan konsep-konsep atau karya kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi maupun nilai-nilai sosial atau ideologi dari suatu bangsa kepada bangsa lain. Eksibisi ini merupakan bentuk diplomasi kebudayaan paling konvensional mengingat gaya diplomasi modern adalah adalah diplomasi terbuka, artinya

²⁵ Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, *Diplomasi Kebudayaan: Konsep dan Relevansi Bagi Negara Sedang Berkembang: Studi Kasus Indonesia*, Ombak, Yogyakarta, 2007, hal. 31

bahwa diplomasi modern secara konvensional menganut dasar yang eksibisionistik dan transparan.²⁶

Eksibisionistik artinya bahwa, setiap bangsa dianggap mempunyai keinginan, bahkan nyaris merupakan keharusan untuk selalu pameran tentang tentang ‘keunggulan-keunggulan’ tertentu yang dimilikinya, sehingga pada gilirannya citra bangsa yang bersangkutan dapat memperoleh kehormatan yang lebih tinggi. Transparan, karena kemajuan teknologi informasi mengakibatkan setiap fenomena yang terjadi didalam suatu negara tertentu dapat saja diketahui negara lain.²⁷

Eksibisi dapat dilakukan diluar negeri maupun didalam negeri, baik secara sendirian (satu negara) maupun secara multinasional. Kenyataan sehari-hari membuktikan bahwa melalui pameran dapat diperoleh manfaat pengakuan yang kemudian dikaitkan dengan kepentingan nasional, baik melalui perdagangan, pariwisata, pendidikan maupun yang lainnya. Biasanya bentuk diplomasi kebudayaan yang disebut eksibisi adalah bersifat formal, legal dan terbuka, serta langsung. Formal yang memberikan pengertian seremonial, protokoler sesuai dengan konvensi yang berlaku. Begitu juga dengan legal, berarti bukan subversif, sesuai dengan konstitusi negara yang bersangkutan. Terbuka, paling tidak untuk media massa, dan langsung. Artinya bahwa eksibisi tersebut disajikan secara langsung kepada masyarakat bangsa lain.²⁸

²⁶ Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, *Diplomasi Kebudayaan: Konsep dan Relevansi Bagi Negara Sedang Berkembang: Studi Kasus Indonesia*, Ombak, Yogyakarta, 2007, hal. 21

²⁷ Ibid

²⁸ Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, *Diplomasi Kebudayaan: Konsep dan Relevansi Bagi Negara Sedang Berkembang: Studi Kasus Indonesia*, Ombak, Yogyakarta, 2007, hal. 21-22

Menurut Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin:

*“Diplomasi Kebudayaan adalah diplomasi yang memanfaatkan aspek kebudayaan untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam percaturan masyarakat internasional. Diplomasi Kebudayaan juga dianggap sebagai alat untuk memperlihatkan tingkat peradaban suatu bangsa”.*²⁹

ASEAN Paragames merupakan salah satu diplomasi kebudayaan dalam bentuk eksibisi yang menggunakan sarana olahraga digabung dengan pariwisata. Hal ini karena didalam serangkaian acaranya terdapat proses pengenalan terhadap keragaman budaya Indonesia, seperti pada saat upacara pembukaan terdapat pertunjukan tetabuhan dari seluruh daerah di Indonesia, menampilkan tarian tradisional bernuansa batik dan kontemporer Jawa bertemakan wayang dengan karakter seperti Gatotkaca, Cakil dan Srikandi.³⁰

Pengenalan terhadap keragaman budaya Indonesia, khususnya budaya Jawa Solo tidak hanya dilakukan pada saat acara pembukaan, namun berkelanjutan dengan adanya tenaga *Liaison Officer* yang mempunyai tugas untuk menjelaskan kepada para atlet mengenai keunggulan-keunggulan kebudayaan Solo serta obyek-obyek wisata yang terdapat di kota tersebut. *Liaison Officer* tersebut juga bertugas mendampingi atlet ketika mereka ingin berjalan-jalan untuk mengenal kebudayaan Solo. Lamanya penyelenggaraan event Asean Paragames yang kurang lebih satu minggu, juga berdampak pada lamanya mereka tinggal. Semakin lama mereka tinggal di kota Solo, maka semakin banyak pengetahuan yang mereka dapatkan tentang pariwisata kota Solo.

²⁹ Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin (ed.et.al), *Profil Budaya Politik Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 1991, hal. 29.

³⁰ <http://olahraga.kompasiana.com/sport/2011/12/16/opening-asean-para-games-2011-meriah/>
diakses pada tanggal 27 September 2012

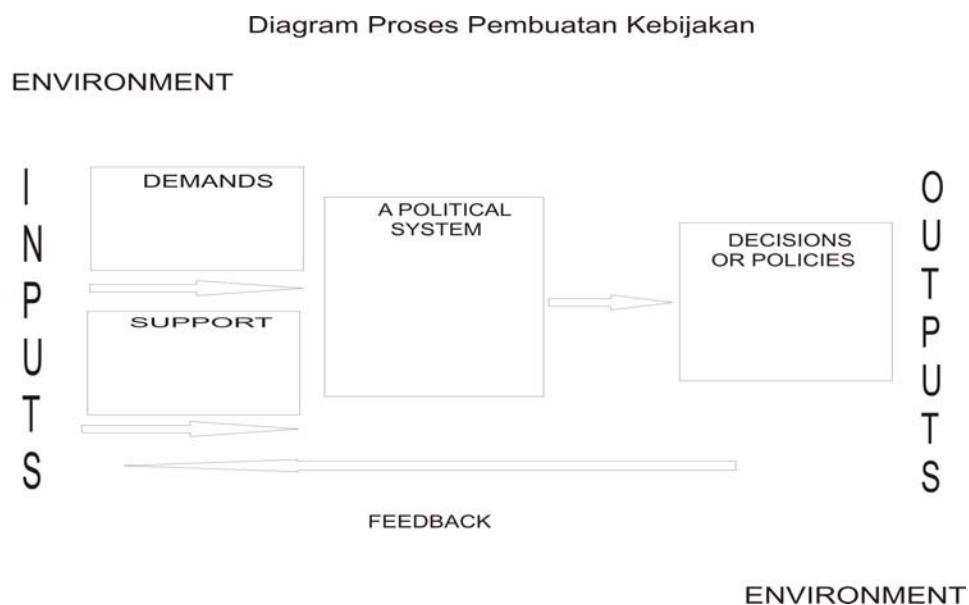
Rangkaian acara dalam seremonial pembukaan dan memanfaatkan keterampilan *Liaison Officer* untuk bercerita tentang Solo merupakan sarana yang dapat digunakan untuk pengenalan potensi pariwisata kota Solo.

2. Teori Kebijakan

Menurut David Easton, *munculnya suatu kebijakan dipengaruhi oleh adanya input yang berupa tuntutan serta dukungan, tanpa dukungan tidak akan bisa dipenuhi atau konflik mengenai tujuan tidak akan terselesaikan.*³¹

Sehingga dalam proses pembuatan kebijakan menurut David Easton digambarkan dengan diagram sebagai berikut:

Gambar 1.1



Sumber : Mochtar Mas' oed dan Colin Mc Andrews³²

³¹ Mochtar Mas' oed, Colin Mc Andrews, *perbandingan sistem politik*. Gadjah Mada University Press, hal.31

Dalam gambar tersebut, Easton memisahkan sistem politik dengan masyarakat secara keseluruhan karena menurut Easton sistem politik adalah semua tindakan yang lebih kurang langsung berkaitan dengan pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat; dan setiap tindakan sosial yang tidak mengandung ciri tersebut tidak termasuk dalam sistem politik.³³ Suatu sistem politik bekerja untuk menghasilkan suatu keputusan (decision) dan tindakan (action) yang disebut kebijakan (policy) guna mengalokasikan nilai. Unit-unit dalam sistem politik menurut Easton adalah tindakan politik (*political actions*) misalnya pembuatan UU, pengawasan DPR terhadap Presiden, tuntutan elemen masyarakat terhadap pemerintah, dan sejenisnya.

Dalam "awal" kerjanya, sistem politik memperoleh masukan dari unit input. Input adalah "pemberi makan" sistem politik. Input terdiri atas dua jenis: Tuntutan dan dukungan. Tuntutan merupakan suatu bagian penting dari bahan dasar yang diperlukan untuk bekerjanya suatu sistem. Tuntutan itu juga merupakan salah satu sumber timbulnya perubahan dalam sistem politik, karena berubahnya lingkungan menyebabkan timbulnya jenis-jenis input-tuntutan yang baru.³⁴ Tuntutan dapat muncul baik dalam sistem politik maupun dari lingkungan (intra dan extrasocietal). Tuntutan yang sudah terstimulasi kemudian menjadi garapan pihak-pihak di dalam sistem politik yang bersiap untuk menentukan masalah yang penting untuk didiskusikan melalui saluran-saluran yang ada di dalam sistem politik.

³² Mochtar Mas'ood, Colin Mc Andrews, *perbandingan sistem politik*. Gadjah Mada University Press, hal.6

³³ Ibid

³⁴ Ibid, hal.12-13

Input-input berupa tuntutan saja tidaklah memadai untuk keberlangsungan kerja suatu sistem politik. Input tuntutan itu hanyalah bahan dasar yang dipakai untuk membuat produk-akhir, yang disebut keputusan. Untuk tetap menjaga keberlangsungan fungsinya, sistem itu juga memerlukan energi dalam bentuk tindakan-tindakan atau pandangan-pandangan yang memajukan dan merintangai suatu sistem politik, tuntutan-tuntutan yang timbul didalamnya, dan keputusan-keputusan yang dihasilkannya. Input ini disebut dukungan (support). Tanpa dukungan, tuntutan tidak akan bisa dipenuhi atau konflik mengenai tujuan tidak akan terselesaikan. Bila tuntutan ingin ditanggapi, anggota-anggota sistem yang memperjuangkan menjadi keputusan yang mengikat dan mereka yang ingin mempengaruhi proses-proses yang relevan harus mampu memperoleh dukungan dari pihak-pihak lain dalam sistem tersebut.³⁵

Setelah tuntutan dan dukungan diproses di dalam sistem politik, keluarannya disebut sebagai output, yang menurut Easton berkisar pada 2 bentuk yaitu keputusan (decision) dan tindakan (action). Output ini pada kondisi lebih lanjut akan memunculkan feedback (umpan balik) baik dari kalangan dalam sistem politik maupun lingkungan. Reaksi ini akan diterjemahkan kembali ke dalam format tuntutan dan dukungan, dan secara lebih lanjut meneruskan kinerja sistem politik. Demikian proses kerja ini berlangsung dalam pola siklus.

Jika diterapkan dengan kasus ini, dalam hubungannya dengan event Olahraga Internasional Asean Paragames, maka Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah memiliki wewenang untuk membuat suatu kebijakan yang diambil

³⁵ Mochtar Mas'oe'd, Colin Mc Andrews, *perbandingan sistem politik*. Gajah Mada University Press, hal.13

guna memperkenalkan salah satu daerahnya, yaitu Kota Surakarta sebagai kota yang tingkat kepeduliannya sangat tinggi terhadap kaum difabel, terutama di bidang Olahraga.

Dalam proses pembuatan kebijakan, diperlukan adanya input yang berupa tuntutan dan dukungan. Dalam hal ini, brand spirit of Java yang diusung oleh Pemerintah kota Surakarta merupakan salah satu input-tuntutan yang dapat mempengaruhi Pemerintah Indonesia dalam pembuatan suatu keputusan atau kebijakan. Brand yang memperkenalkan kota ini sebagai pusatnya kebudayaan Jawa dengan segala keramah tamahannya menjadi daya tarik tersendiri untuk menjadikannya teladan bagi kota lain. Dengan adanya brand tersebut tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi kota Solo untuk dapat menyaingi daerah lain dalam memajukan daerahnya dalam segala aspek, baik perdagangan, pariwisata, olahraga, dan lain-lain.

Selain input-tuntutan diatas, adapula input yang berupa dukungan yaitu adanya Visi kota Solo yaitu “ Terwujudnya Kota Sala sebagai Kota Budaya yang bertumpu pada potensi Perdagangan, Jasa , Pendidikan, Pariwisata dan Olahraga”.³⁶ Dari kutipan visi tersebut dapat kita lihat bahwa salah satu potensi kemajuan kota Solo bertumpu pada bidang Olahraga. Tentu saja wujud dari visi tersebut dibuktikan atau dibarengi dengan kepedulian Pemerintah Kota Solo dengan menciptakan sarana dan prasarana olahraga yang memadai, baik untuk kaum difabel maupun non difabel. Selain dua input tersebut, input dukungan yang lain yaitu adanya pusat rehabilitasi bagi kaum difabel dan Solo mempunyai

³⁶ <http://www.surakarta.go.id/konten/visi-misi-dan-lambang> diakses pada tanggal 1 Januari 2012

pengalaman menyelenggarakan event olahraga serupa yang dikhususkan bagi kaum difabel. Input-input itulah yang kemudian dijadikan sebagai input-dukungan yang dapat mempengaruhi sistem politik dalam proses pembuatan kebijakan.

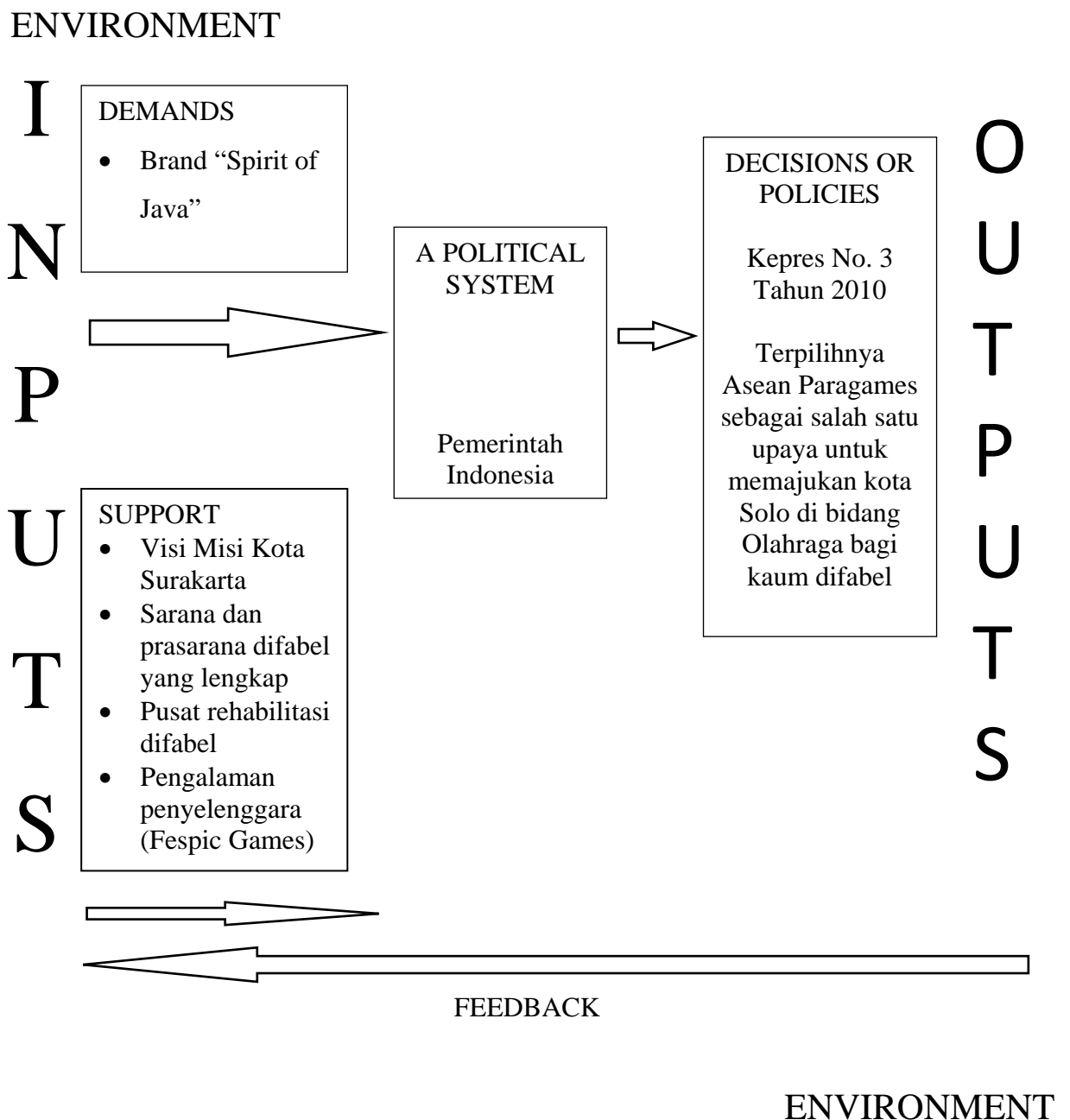
Input-input yang ada tersebut, baik berupa tuntutan maupun dukungan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia (Presiden) dalam proses pembuatan kebijakan mengenai event-event olahraga, baik nasional maupun Internasional, dalam hal ini misalnya seperti Asean Paragames 2011. Output dari kebijakan tersebut biasanya merupakan tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan sesuatu.

Dengan berbagai input diatas, kebijakan yang dihasilkan adalah adanya Keppres No 3 Tahun 2010 yang menetapkan Solo sebagai tempat diselenggarakannya Asean Paragames 2011. Sarana Prasarana olahraga difabel yang memadai, Visi kota Solo, adanya pusat rehabilitasi difabel dan pengalaman Solo sebagai penyelenggara event difabel serupa serta Branding Spirit of Java yang terkonsep dengan baik menjadikan Pemerintah Indonesia memilih Solo sebagai tempat penyelenggaraan event Internasional tersebut. Dalam menerapkan kebijakan, Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk dapat memberikan keuntungan kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap event Asean Paragames ini, khususnya Pemerintah Kota Solo yang ingin memajukan daerahnya, khususnya di bidang olahraga bagi kaum difabel sebagai bentuk output dari kebijakan tersebut.

Dalam proses pembuatan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menyikapi event tersebut dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut:

Gambar 1.2

Diagram Proses Pembuatan Kebijakan



D. Hipotesa

Kepentingan Pemerintah Indonesia dengan menetapkan Solo sebagai tempat diselenggarakannya 6th ASEAN Paragames 2011 adalah:

1. Ingin memanfaatkan event olahraga internasional ini sebagai salah satu sarana atau alat promosi atau pengenalan pariwisata kota Solo dengan tujuan mendapatkan pengakuan dari bangsa lain.
2. Ingin memajukan kota Solo di bidang olahraga, khususnya olahraga bagi kaum difabel.

E. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode deduktif dalam menulis skripsi ini yaitu dengan berdasarkan kerangka teori, kemudian ditarik suatu hipotesa yang akan dibuktikan melalui data-data empiris yang ada. Penulisan ini bukan hanya bersifat *library research* atau studi kepustakaan dengan menggunakan media cetak seperti surat kabar atau koran, majalah dan tabloid, namun penulis juga akan menggunakan metode wawancara dan observasi. Penggunaan situs-situs internet sebagai sumber data juga dilakukan.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan, selanjutnya jangkauan penelitian mengenai diplomasi kebudayaan melalui sarana Pergelaran Asean Paragames 2011 hanya akan membahas pada tahun dan tempat terselenggaranya

event ini. Akan tetapi penulis tetap tidak akan mengesampingkan data-data diluar jangkauan tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Bab I : Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesis, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II : Bab ini akan membahas mengenai Sejarah lahirnya Asean Paragames dan profil Asean Paragames 2011

Bab III : Bab ini akan memberikan gambaran tentang Pariwisata Solo

Bab IV : Bab ini membahas mengenai Proses Pengambilan Keputusan dalam menetapkan Solo sebagai tempat diselenggarakannya Asean Paragames 2011

Bab V : Kesimpulan